

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harold Laswell memberikan formulanya mengenai unsur-unsur utama dalam komunikasi yang terangkai dalam kalimat *"Who says what in which channel to whom with what effect"*. Dijelaskan bahwa lima unsure komunikasi dalam sebuah proses komunikasi tidak hanya membutuhkan komunikan dan komunikator. Tetapi, diperlukan media sebagai penghantar dalam komunikasi tersebut. Dalam konteks komunikasi politik, keberadaan media massa menjadi sangat penting sebagai ruang membentuk realitas. Media memiliki cara tersendiri untuk menampilkan peristiwa-peristiwa politik dan menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik. Bentuk pembicaraan politik tersebut, yakni berupa teks berita politik (Ibnu Hamad, 2004:9).

Perkembangan politik lokal pasca diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah, Secara resmi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berlaku sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan revisi terakhir di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoni yakni UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. di Indonesia tak sepenuhnya membawa angin segar untuk kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Justru, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi lahan "bancaan" bagi sebagian elite untuk mendulang keuntungan, baik dalam bentuk akses kemudahan berkuasa maupun mendapatkan kekayaan secara instan. Memang, sejak reformasi bergulir, sistem politik dan pemerintahan Indonesia semakin terbuka dan memberikan akses bagi tumbuh-berkembangnya demokrasi. Namun demikian, perkembangan demokrasi di tingkat lokal (juga pusat) memunculkan oligarki baru yang menggerus sumber daya ekonomi-politik dengan memanfaatkan demokrasi elektoral. (Hadiz, 2005 : 100)

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sorotan munculnya orang kuat lokal (*local strongmen*) ialah di Kabupaten Bangkalan Madura. Dalam kata pengantar buku ini (hlm. xix), Okamoto Masaaki menyebutkan ada beberapa catatan penting untuk memahami oligarki yang berkembang di Bangkalan Madura. Hal ini menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pertama, letak geografis Bangkalan berdekatan dengan Surabaya. Oleh karena itu, dekatnya dengan kota besar memberikan keuntungan bagi elite lokal untuk mengembangkan lebih banyak sumber daya ekonomi dari pada elite lokal di daerah lain yang jauh dari kota besar. Atau sebaliknya, elite lokal memiliki peluang untuk menjadi agen bisnis dari kota besar. Kedua, beberapa atau sebagian besar daerah merupakan wilayah pertanian yang miskin. Ketiga, pengaruh Islam sangat kuat dan pemikiran konservatif para kiai masih dominan, dari sini muncul patron-klien antara kiai dan masyarakat. Keempat, aktor kekerasan yang dikenal dengan sebutan blater. Kelompok kekerasan dengan penyebutan blater lebih dikenal di Bangkalan dan Sampang, sedangkan di Sumenep dan Pamekasan lebih dikenal dengan nama bejingan “dipelihara” oleh elite lokal untuk kepentingan ekonomi-politik dan mempertahankan *status quo*.

Berangkat dari argumentasi bahwa liberalisasi politik dalam arena demokrasi elektoral membuat aktor politik lokal di Madura, khususnya kiai mengambil peran untuk ikut berkompetisi dalam percaturan politik elektoral. Sehingga sejak era reformasi, Kiai di Madura menduduki posisi sentral dalam pemerintahan sebagai Bupati, sesuatu yang menurut Rozaki tidak pernah terjadi di era Orde Baru. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam studi ini adalah: bagaimana orang kuat lokal di Bangkalan membangun oligarki politik di tingkat pemerintahan lokal dan tipe oligarki politik seperti apakah yang dikembangkan oleh orang kuat lokal hingga menimbulkan perlawanan sosial dari masyarakat.

Kemunculan oligarki politik di Madura tidak dapat dilepaskan dari adanya kultur keagamaan dominan. Menurut Rozaki, posisi kiai yang memiliki kharisma dan pengaruh di mata masyarakat yang secara tidak langsung membuat

masyarakat tergantung kepada kiai, tidak hanya dalam urusan keagamaan, bahkan urusan politik pun masyarakat “menyerahkan” kepada arahan dari kiai. Di Madura, khususnya di Bangkalan, salah satu kiai yang memiliki pengaruh penting, bahkan meluas ke luar wilayah Madura, ialah Syaikhona Kholil. (Qomar, Jakarta: 20). Pengaruh dan kharisma dari beliau kemudian dimanfaatkan oleh keturunannya untuk membangun legitimasi kepada masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Fuad Amin, cicit dari kiai Kholil. Menurut Rozaki, Fuad Amin berhasil mentransformasikan *symbolic goods* ke *symbolic power* dengan menggunakan modal budaya, mem-*framing* pengaruh Syaikhona Kholil di dalam masyarakat yang ditransformasikan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan. Modal budaya ini pada akhirnya memudahkan dirinya untuk memperoleh modal ekonomi dan modal sosial.

Cara Fuad Amin dalam membangun oligarki kekuasaannya, yakni membangun representasi tunggal sebagai sosok yang paling otoritatif dalam menggunakan ikon sebagai *trah* Bani Kholil dibandingkan dengan *trah* lainnya. Dari sini, Fuad Amin memproduksi silsilah (*geneology*) yang merujuk garis tunggal sebagai keturunan laki-laki satu-satunya dari kalangan *trah* Bani Kholil. Berhubung kultur patriarki di Madura sangat kental, maka usaha yang dilakukan Fuad Amin ini cukup berhasil. *Selain itu, Fuad Amin juga* mendudukkan dan merangkul ratusan kepala desa atau klebun. Tujuannya, para klebun tersebut memiliki hutang budi dan tergantung kepada Fuad Amin. Ketergantungan ini dibuat Fuad Amin secara sistematis dengan cara membiarkan status kepala desa sebagai PJS (pejabat sementara) dan tidak diadakan pemilihan.

Di sisi lain, Fuad Amin juga merangkul kepala desa dengan cara membagi-bagikan pengerjaan proyek pembangunan yang masuk ke desa. Selain bagi-bagi kue proyek, Fuad Amin juga membiarkan praktik penyimpangan yang dilakukan kepala desa, seperti bantuan beras miskin (raskin), proyek desa lainnya. Di sini, para kepala desa juga banyak yang berlatarbelakang blater. *Cara lain yang dilakukan Fuad Amin, yakni* membangun jembatan politik dengan para elite politik, khususnya di tingkat nasional. Merangkul semua pengurus parpol dan

anggota DPRD untuk kepentingan kekuasaannya. Mengendalikan berbagai instrumen penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPUD. Selain itu menyingkirkan wakil bupati dengan mengendalikan birokrasi secara penuh dan membersihkan rezim lama yang tidak mau kooperatif dengan kepentingannya. *Fuad Amin* juga membangun romantisme dengan para penegak hukum seperti kejaksaan, dan kepolisian. Membangun hegemoni dengan lingkungan Perguruan Tinggi (PT) atau kampus. (hlm. 118-143).

Bangunan oligarki politik yang dikembangkan oleh *Fuad Amin* akhirnya mengarah pada pelanggengan dinasti politik, di mana setelah dia tidak bisa mencalonkan kembali sebagai bupati lantaran dibatasi undang-undang karena sudah dua periode memimpin (2003-2008 dan 2008-2012), dia mewariskan kepada anaknya, *Makmun Ibnu Fuad*. Dengan segala cara, *Fuad Amin* berusaha agar dinasti kekuasaannya bisa diteruskan oleh anaknya, termasuk menjegal lawan-lawan politik. Kendati dari kalangan keluarga sendiri sebagaimana yang dialami oleh *Imam Buchori*. Terbukti, *Makmun Ibnu Fuad* terpilih pada Pilkada Bangkalan 2012 dan *Fuad Amin* terpilih menjadi Ketua DPRD (2014-2019) dari Fraksi Gerindra. Sosok Sosok *Fuad Amin* ini kemudian oleh *Rozaki* disebut sebagai Oligarki Kleptokratik Represif. (Iskandar, Kompas: 279).

Fuad Amin resmi turun dari jabatannya pada Maret 2013 lalu. Pria yang pernah menjadi orang nomor satu di Bangkalan selama satu dekade ini pernah mencatatkan beberapa masalah selama menjabat sebagai kepala daerah. Pada 2012 lalu, misalnya, *Fuad Amin* sering dipaksa meladeni tuduhan kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Muda Madura (GEMURA). Para pemuda dari kelompok ini melontarkan tuduhan bahwa *Fuad Amin* menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan. Tidak hanya sampai pemalsuan, *Fuad Amin* juga dituduh sering melakukan korupsi selama menjabat bupati. Tuduhan itu berawal dari kasus pemeriksaan *Fuad Amin*, saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI, di Mabes Polri pada 2003 silam atau bertepatan dengan masa pencalonan *Fuad Amin* menjadi Bupati Bangkalan. Namun, tidak ada kejelasan lebih lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut dan kasus seolah

terbengkalai bahkan hingga di masa akhir periode kepemimpinan Fuad Amin. Ketidakjelasan kasus ini menjadi pemicu kemarahan pihak Gemura, di samping tuduhan berbagai kasus korupsi yang dilontarkan kepada Fuad Amin.

Sempat berorasi keliling di depan Istana Keprisidenan RI, massa Gemura menuduh Fuad Amin melakukan korupsi terhadap dana pengungsi korban konflik antar-suku di Sampit, berbagai pengadaan barang perjalanan dinas. Salah satu wakil kelompok pemuda Madura ini bahkan menunjukkan bukti audit BPK lengkap dengan nomor 64/R/XIV.12/12/2006 yang mensinyalir penguapan dana pengungsi Sambas.

Bertepatan dengan masa pencalonan Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan pada 2003 silam, sempat dikabarkan terjadi perselisihan antara Fuad Amin dan pesaing beratnya, Imam Buchori. Meski isu tersebut dibantah, hubungan keduanya kembali renggang saat masa pemilihan Gubernur Jatim pada 2008. Imam Buchori merupakan pendukung setia Cagub Khofifah Indar Parawansa yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Wanita, sedangkan Fuad Amin merupakan pendukung kuat Soekarwo, Gubernur Jatim yang sedang menjabat. Hubungan kedua tokoh ini makin parah setelah Imam Buchori kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Zainal Alim, dianulir oleh KPU setempat berdasar putusan PTUN Surabaya yang menyatakan salah satu dukungan parpol mereka cacat hukum.

Berdasar keputusan KPUD tersebut, hanya dua pasangan calon yang berhak maju dalam pemilihan Bupati Bangkalan periode 2013 - 2018 dan salah satunya adalah Makmun Ibnu Fuad, anak Fuad Amin sendiri. Terkait pencalonan anaknya, Fuad Amin sempat berkomentar bahwa dirinya sebenarnya ingin mengajukan istri mudanya sebagai calon bupati. Namun niatan ini diurungkan sendiri karena takut kalau-kalau malah lepas, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut maksud komentar tersebut. Pada Maret 2013 lalu, Fuad Amin resmi berpamitan kepada semua staf setelah menjabat selama 10 tahun. Jabatan Bupati Bangkalan 2013 - 2018 secara resmi berada di tangan putra Fuad Amin, Makmun

Ibnu Fuad atau biasa dipanggil dengan nama kecil Ra Momon. (Fuad Amin, Profil : merdeka.com.)

Bangunan oligarki politik yang dikembangkan Fuad Amin akhirnya mengarah pada pelanggengan dinasti politik, di mana setelah dia tidak bisa mencalonkan kembali sebagai bupati lantaran dibatasi undang-undang karena sudah dua periode pemimpin (2003-2008 dan 2008-2012), dia mewariskan kepada anaknya, Makmun Ibnu Fuad. Dengan segala cara, Fuad Amin berusaha agar dinasti kekuasaannya bisa diteruskan oleh anaknya, termasuk menjegal lawan-lawan politik walaupun dari kalangan keluarga sendiri sebagaimana yang dialami oleh Imam Buchori. Terbukti, Makmun Ibnu Fuad terpilih pada Pilkada Bangkalan 2012 dan Fuad Amin terpilih juga menjadi Ketua DPRD (2014-2019) dari Fraksi Gerindra. Sosok Fuad Amin ini kemudian oleh Rozaki disebut sebagai Oligarki Kleptokratik

Sepak terjang Fuad Amin Imron berakhir. Penguasa Bangkalan itu dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta setelah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) Senin, 1 Desember 2014. Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ini ditangkap atas dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Diduga penyuapan dilakukan Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko melalui perantara pemberi Koprak Satu TNI AL Darmono. Uang suap untuk Fuad Amin itu disampaikan lewat perantara Ra'uf (ajudan Fuad). Penangkapan Fuad Amin merupakan rangkaian OTT Senin (1/12) siang hingga Selasa dini hari. Pertama, posisi kasusnya. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Ra'uf sebagai perantara Fuad Amin pada Senin (1/12) pukul 11.30 WIB. Penangkapan terjadi di parkir Gedung AKA di Jalan Bangka Raya No 2, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan uang Rp700 juta di mobil Fuad Amin. Uang yang terbagi dalam pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 itulah yang diduga pemberian Antonio untuk Fuad. Lima belas menit kemudian, Antonio ditangkap di gedung yang sama. Selanjutnya, pukul 12.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap Koptu Darmono selaku perantara pemberi di lobi Gedung Energy Building di The Energy Tower, Sudirman Central Bussines District (SCBD) Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan.

Dari sini KPK lalu terbang ke Bangkalan dan menangkap Fuad Amin. Cucu Syaicona Kholil tersebut dibawa ke Jakarta. Dari rumah Fuad Amin, penyidik menyita tiga koper berisi uang tunai yang masih dihitung jumlahnya. Berdasar informasi, penangkapan Fuad Amin mendapat dukungan pengamanan ketat. Selain petugas KPK, kepolisian setempat mengerahkan 1 peleton Sabhara Polres Bangkalan, 1 unit Sat Intel, dan 1 unit Sat Reskrim. Proses penangkapan tersebut lolos dari pantauan media. Para tokoh setempat baru mengetahui keesokan hari. Berdasarkan penelusuran KPK, PT MKS memang punya kerja sama dengan anak perusahaan PT Pertamina Tbk, Pertamina Hulu Energy. Dalam kaitan dengan itu, ada BUMD Bangkalan, yakni PD Sumber Daya (PDSD), juga masuk sebagai pemasok gas tersebut. Bambang membeberkan, PT MKS sejak beberapa tahun lalu membeli gas dari Pertamina EP. KPK sendiri tengah mendalami apakah PT MKS dan PD Sumber Daya sebagai makelar dan calo.

Kasus penangkapan tersebut menjadi angin segar bagi para awak media, seperti diketahui sebelumnya, Fuad Amin tidak segan-segan untuk mengintimidasi dan mengkooptasi para awak media yang terkesan kritis dan menggoyahkan kekuasaanya. Meski demikian masih banyak media yang tak mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan secara riil. Media adalah agen konstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya (Eriyanto, 2002:23). Hal inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi konstruksi para Wartawan media tersebut dalam memberitakan kasus penangkapan Fuad Amin. Terkait dengan peran individu dalam mengkonstruksikan realitas secara subyektif, para pekerja

media pun mempunyai potensi untuk terpengaruh oleh kelompok dominan yang ingin menciptakan realitas sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini disebabkan karena media massa mempunyai pengaruh kuat terhadap pembentukan makna atau citra tentang sebuah realitas (Sobur, 2006: 92) dalam diri individu para Wartawan. Oleh karena itu, media massa sebagai pemberi informasi terhadap publik tidak dapat dianggap sebagai institusi yang tidak memihak. Hal ini akan membuat kita kembali pada pernyataan bahwa media bukanlah sesuatu yang bebas dan netral. Keberadaan perusahaan media inilah yang punya pengaruh cukup besar dalam memperkuat konstruksi realitas sosial para Wartawan. Ideologi dan sistem kerja dalam media massa berpengaruh besar dalam mengukuhkan pola konstruksi yang dihasilkan Wartawan. Arah berpikir para Wartawan pun mengalir dengan sendirinya mengikuti keberadaan sang Wartawan di media tersebut. Pola konstruksi yang terjadi akan semakin terlihat pada isi tulisan yang dimuat oleh Wartawan dan memperkuat konstruksi para Wartawan terkait penangkapan Fuad Amin oleh KPK.

Dari pemaparan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana wartawan local bangkalan mengkonstruksi berita mengenai penangkapan tersebut dengan judul "Kontruksi Wartawan Media Di Bangkalan Terhadap Penangkapan Fuad Amin Oleh KPK".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana wartawan media di Bangkalan mengonstruksi berita penangkapan Fuad Amin oleh KPK?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi wartawan media di Bangkalan terhadap penangkapan Fuad Amin oleh KPK.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat terus memberikan manfaat di kemudian hari baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Berikut manfaat yang dimiliki penelitian:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas pengetahuan peneliti dalam hal komunikasi massa, khususnya tentang Konstruksi Realitas Sosial di Media Massa. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Prodi Ilmu Komunikasi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian mengenai media secara lebih mendalam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan teori-teori komunikasi dan menjadi referensi penelitian lain yang sejenis.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi media tentang konstruksi pemberitaan penangkapan OTT Fuad Amin oleh KPK untuk selalu melakukan evaluasi, memberikan berita yang berimbang, dan sesuai dengan realitas sosial. Tujuannya pembaca dapat mendapatkan berita yang utuh.